BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu persoalan paling serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan disintegrasi. Beberapa wilayah (seperti Aceh, Riau, Papua dan Maluku) berniat memisahkan diri dari Indonesia. Bagi wilayah-wilayah ini, bangsa Indonesia bukanlah sebuah ikatan politik yang permanen. Apalagi jika dihadapkan pada represifisme negara (melalui sayap militernya TNI/Polri), eksploitasi alam dan 'penjajahan' sistematis yang dilakukan terhadap beberapa wilayah tersebut. Hal ini dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kasus yang muncul dengan bentuk gugatan terhadap negara adalah pemberontakan rakyat Aceh untuk tetap tunduk dibawah hukum negara yang militeristik, dimana dibalas dengan pemberlakuan darurat militer oleh pemerintah untuk meredam gejolak kemerdekaan bangsa Aceh.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 dan dideklarasikan oleh Hassan Tiro. Sejak GAM diproklamirkan, pemerintah RI selalu berusaha menumpas habis gerakan tersebut lewat berbagai operasi militer. Tapi

terbunuh tetapi dengan segera timbul penggantinya. Sebagai contoh Panglima GAM Tgk Abdullah Syafii digantikan oleh Muzakir Manaf (*Gatra*, 27 Agustus 2005).

Pada bulan Mei 1990-1998 Aktivitas GAM meningkat. Operasi Jaring Merah, yang kemudian dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM), mulai diberlakukan. Jumlah personel TNI meningkat, dari 6.000 menjadi 12.000 personel dan operasi ini berakhir pada tanggal 7 Agustus 1998 (*Gatra*, 27 Agustus 2005).

> Upaya pemerintah untuk menyeret Hasan Tiro dkk sebagai petinggi GAM di Swedia ke meja hijau pun, sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Memang pilihan berunding dengan GAM harus diambil oleh pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Tanggal 12 Mei 2000 Indonesia dan GAM menandatangani MoU jeda kemanusiaan di Davos, Swiss dilanjutkan pada Tanggal 6-10 Januari 2001 Difasilitasi Henry Dunant Center (HDC), Indonesia dan GAM menyetujui sebulan jeda kekerasan untuk dialog kemanusiaan di Swiss (*Gatra*, 27 Agustus 2005).

Perundingan demi perundingan pun dilalui oleh pemerintah dan GAM, pada tanggal 9 Desember 2002 lalu Indonesia-GAM menandatangani perjanjian penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement-COHA*) di kantor pusat HDC di Jenewa Swiss. Namun pada tanggal 15 Februari 2003 Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee*) gagal menyepakati mekanisme demiliterisasi di Aceh *(Gatra,* 27/08/2005*)*.

Pada tanggal 18 Mei 2003 kondisi Aceh memburuk, melalui Keppres Nomor 28/2003, Presiden Megawati menyatakan seluruh Nanggroe Aceh Darussalam dalam

enam bulan pada tanggal 6 November 2003, lalu pada tanggal 18 Mei 2004 status darurat militer diubah jadi darurat sipil selama enam bulan dan diperpanjang lagi selama enam bulan pada tanggal 18 November 2004.

Anggota MPR asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, menyarankan pemerintah dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebaiknya berunding kembali menyelesaikan masalah di "Serambi Mekkah" itu secara damai, bukannya dengan cara kekerasan atau operasi militer dengan memberlakukan status darurat militer (*Gatra*, 6/11/2003).

> "Saya minta kepada Presiden Megawati dan Hasan Tiro tolong pakai hati yang sebenarnya, berundinglah, itu yang paling tepat, jangan berpegang pada gengsi masing-masing," katanya. Pemerintah harus bisa "menembak" hati seluruh orang Aceh agar tetap berada dalam satu bangsa, bukan hanya memerangi mereka yang justru akan menimbulkan dendam berkepanjangan. Diakuinya, berkaca pada pengalaman perundingan yang telah dijalankan menemui jalan buntu, tetapi hal itu bukan alasan untuk tidak berunding kembali (*Gatra*, 6/11/2003).

Gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 lalu telah menyadarkan kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik Aceh, Mereka sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

> Pada tanggal 27-29 Januari 2005 Difasilitasi Crisis Management Initiative, Indonesia-GAM berunding di Helsinski, Finlandia, namun tidak ada hasil. Lalu pada bulan Februari-Juli 2005 dilakukan lagi perundingan putaran II-V di Helsinski. Pada perundingan tersebut GAM tidak lagi menuntut untuk merdeka dan tidak mempersoalkan konstitusi di negara kesatuan RI. Pada

damai disepakati. Kesepakatan damai Indonesia-GAM tersebut ditandatangani di Helsinski pada tanggal 15 Agustus 2005 (*Gatra*, 27/08/2005).

MoU tersebut memperinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi antara Pemerintah RI dan GAM. Namun belum ada kejelasan mengenai isi dari perjanjian nota kesepahaman tersebut sehingga banyak menuai kritikan dan pernyataan dari berbagai kalangan, oleh karena itu perlu adanya klarifikasi pemerintah tentang butir-butir pada nota kesepahaman tersebut guna menghindari multi interpretasi. Menurut Panglima TNI Endriartono Sutarto "Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan sebaik-baiknya, poin demi poin MoU yang ada memang masih memerlukan suatu kejelasan agar tidak lagi jadi misinterpretasi, Menko Polhukam sekarang sedang menggarapnya, sekaligus menjelaskan masing-masing butir dari MoU itu" (*Gatra* 25/08/05).

> Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan segenap menteri Kabinet Indonesia Bersatu pun berbinar-binar saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut melalui televisi. Rakyat di seantero Aceh juga menyambut gembira. Doa sujud syukur bersama digelar di masjid-masjid. Terbayang kembali konflik bersenjata sepanjang 30 tahun itu, yang telah menimbulkan ribuan jiwa, kesengsaraan, ketidakpastian, dan segala rupa derita. Kini semua itu telah berakhir (*Gatra*, edisi 27 Agustus 2005).

Sementara itu di luar Aceh, justru sambutan sumbang yang ramai terdengar. Awalnya telah terasa tiga hari menjelang kesepakatan diteken. Beberapa politisi nasional, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Akbar

> Begitu poin-poin kesepakatan tersebut terkuak, suara-suara sumbang pun semakin berhamburan. Megawati, misalnya, mengkritik kesepakatan itu secara blak-blakan. "Isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan," ujar Megawati. Ia menuduh kesepakatan damai itu telah menaikkan status Aceh menjadi semacam negara bagian di Indonesia. Bau federalisme itu terendus, menurut Megawati, dalam butir yang memperbolehkan Aceh menggunakan bendera dan hymne sendiri (*Tempo*, edisi 22-28 Agustus 2005).

Melihat adanya realitas tersebut, media mengemas dan menyajikan kembali dalam bentuk berita. Berita yang dibuat tidak dapat terlepas dari opini dan keberpihakan wartawan yang membuatnya sehingga terjadi perbedaan sudut pandang atau penekanan berita yang disajikan antara media yang satu dengan media lainnya.

Majalah *Tempo* dan *Gatra* adalah contoh dari adanya perbedaan sudut pandang media dalam melihat dan menyajikan realitas sosial tersebut ke dalam bentuk berita. Baik majalah *Tempo* maupun *Gatra* memiliki komposisi pemberitaan yang berlainan dan cara tersendiri dalam membingkai dan mengkonstruksi suatu pemberitaan mengenai Nota Kesepahaman antara GAM-RI. Dalam hal ini majalah *Tempo* dalam menyajikan berita cenderung sesuai dengan fakta realitas yang ada. Referensi yang diangkat oleh majalah *Tempo* juga cenderung lebih kritis dan berani sehingga penekanan beritanya lebih tajam. Sedangkan pada majalah *Gatra* cenderung lebih moderat dalam mengemas suatu berita dan menyajikannya kembali sebagai realitas baru. Referensi yang diangkat oleh majalah *Gatra* menekankan pada tokoh-tokoh pemerintah

Banyak orang mengatakan *Tempo* adalah anak kandung Orde Baru. Ia muncul

lahir dari rahim Orde Baru, *Tempo* menempuh jalan yang berbeda. Tempo tetap menjaga integritasnya dengan mengambil jarak dari pusat-pusat kekuasaan.

Yang membedakan *Tempo* dari media lainnya adalah caranya mengemas kritik. Dalam melontarkan kritikan-kritikannya, *Tempo* menggunakan gaya bahasa yang renyah dan nyaman. Motto *Tempo* yang terkenal, "enak dibaca dan perlu", hingga kini mewarnai pemberitaan *Tempo.* Gaya jurnalisme yang diusung seakan ingin mendobrak kebekuan bahasa pada masa itu yang dianggap terlalu kental dengan slogan dan *bombasme*. Dalam hubungannya dengan rezim Soeharto, *Tempo* dianggap "duri dalam daging". Di satu sisi, *Tempo* diakui kredibilitas pemberitaannya, tetapi di sisi lain *Tempo* tetap perlu diawasi karena pemerintah menganggap majalah ini terlalu kritis terhadap rezim.

Satu ilustrasi menarik dari adanya "jarak" ini tergambar dari pertemuan Jenderal Soemitro dengan sejumlah redaktur koran di Jakarta pada 19 Januari 1972. Pertemuan yang politis ini tampaknya dimaksudkan untuk mengawasi kinerja jurnalisme agar tak terlalu kritis terhadap pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Goenawan Mohammad menulis di *Tempo*, bahwa kritik merupakan bagian kerja dari jurnalisme. (Http://www.tempointeraktif.com, *downloads* 2 Oktober 2005).

Tempo luput dari pembredelan dua kali pada masa Orde Baru, tahun 1974 dan 1978, tetapi tak bisa mengelak ketika pemberitaannya pada 1982 saat terjadi insiden Lapangan Banteng menjelang Pemilu 1982 dianggap pemerintah mengganggu

dengan Departemen Penerangan untuk tidak meliput isu-isu yang sensitif, termasuk yang menyangkut keluarga "Cendana" (Http://Indo-News.com, *downloads* 17 September 2005).

Pada tahun 1984 terjadi pembredelan karena pemberitaan *Tempo* mengenai masalah ketidakberesan dalam kampanye Golkar, namun *Tempo* bangkit dan hidup kembali. Batu sandungan yang dihadapi *Tempo* tidak berhenti sampai disini, *Tempo* masih dianggap terlalu berani dalam menyajikan berita-beritanya kepada publik dan telah mengganggu pemerintah orde baru, seperti pemberitaan tentang peristiwa Timor Timur pada tahun 1991, hingga ke pemberitaan soal pembelian kapal laut bekas Jerman Timur yang akhirnya membawa *Tempo* pada pembredelan keduanya.

> 21 Juni 1994 adalah tanggal bersejarah bagi pers Indonesia. Pada hari itu perintah pencabutan SIUPP terhadap majalah *Tempo*, yang disusul kemudian dengan pembredelan *Detik* dan *Editor*. Keputusan pembredelan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Penerangan Harmoko, yang waktu itu dikenal luas sebagai "tangan kanan" rezim Soeharto. Pembredelan Tempo menorehkan noda hitam dalam sejarah pers Indonesia, setelah sebelumnya nasib serupa juga menimpa harian Indonesia Raya asuhan Mochtar Lubis. Harus diakui, *Tempo* saat itu memang menjadi momok buat rezim. Majalah ini bukan saja populer dengan independensinya yang tinggi, tetapi juga keberaniannya mengungkap fakta di lapangan. Ketika banyak media memilih bungkam mengenai peristiwa tertentu, *Tempo* berbicara (Http://www.tempointeraktif.com, *downloads* 2 Oktober 2005).

Agaknya pembredelan yang dilakukan pemerintah terhadap Majalah *Tempo* menimbulkan konflik intern di dalam redaksi tersebut. Beberapa wartawan

terhadap kebebasan pers pada masa itu membuat mereka berpikir untuk mendirikan media baru. Terdapat permasalahan yang menarik disini. Setelah terjadi pembatalan SIUPP (pembredelan) *Tempo* pada tahun 1994, pihak penerbit *Tempo* yang pada waktu itu adalah PT. Grafiti Pers seolah-olah tidak ingin kehilangan para pembacanya yang sudah mencapai ratusan ribu, sehingga timbul pemikiran untuk dari Grafiti Pers untuk mengisi kekosongan itu. Akhirnya kekosongan itu dimanfaatkannya dan beberapa wartawan eks *Tempo* untuk membentuk majalah baru dengan format yang sama dengan nama berbeda yaitu *Gatra.*

Gatra memulai terbit edisi perdananya beberapa saat setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 1994. Beberapa wartawan dan direksi eks *Tempo* yang ikut mendirikan majalah ini diantaranya Karni Ilyas, Ed Zoelferdi dan Herry Korman. Majalah ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Semula, redaksi ini diberi nama Garda, namun nama tersebut diubah menjadi Gama atau Tegar. Kemudian setelah mempertimbangkan usulan-usulan nama yang masuk, akhirnya semua sepakat dengan nama redaksi yang baru yaitu Gatra.

Sepeninggal beberapa wartawannya yang kini telah mendirikan redaksi *Gatra*, tidak membuat redaksi *Tempo* menyerah dan bubar. Beberapa wartawan yang tersisa memilih untuk tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan idealisme mereka dalam menyajikan berita. Pasca pembredelan 21 Juni 1994, *Tempo* melakukan gerilya dengan mendirikan Tempointeraktif secara *klandestin* dan

membuktikan komitmen *Tempo* pada demokratisasi dan kebebasan pers yang dipasung secara sistematis pada masa orde baru.

Reformasi telah membawa angin segar bagi insan pers Indonesia. Lengsernya Soeharto pada masa itu membuka peluang demokratisasi dan kebebasan pers dalam menulis berita. Majalah Tempo kembali terbit pada tanggal 6 Oktober 1998. Namun sekembalinya *Tempo* dalam industri jurnalistik membuat redaksi tersebut harus bersaing dengan saudara mereka sendiri yang kini telah mendirikan redaksi Gatra.

Bagi sebuah majalah yang terus berjuang untuk eksis dan mengedepankan mutu jurnalistik serta suatu model perusahaan media yang sehat dan modern, *Tempo* masih harus membuktikan bahwa kedalaman pemberitaan yang ditulisnya serta cara penulisan yang "enak dibaca dan perlu" itu memang masih dibutuhkan oleh publik. Konservasi macam begini makin sempit lahannya, tetapi harus terus dipelihara sembari memberi ruang lebih luas bagi sumber daya manusia yang hidup di dalamnya.

Perbedaan sudut pandang kedua majalah tersebut terlihat jelas pada sebuah realitas yang diberitakan oleh keduanya mengenai MoU RI-GAM. Keduanya

Berikut ini beberapa berita yang diturunkan oleh kedua media tersebut:

Tabel 1.1 Berita *Tempo* tentang

Nota Kesepahaman RI-GAM

Edisi	Judul Berita
22-28 Agustus 2005	Yang Berganti Seperti Musim

Sumber: *Tempo*, yang disusun kembali oleh peneliti

Tabel 1.2 Berita *Gatra* tentang

Nota Kesepahaman RI-GAM

Edisi	Judul Berita
27 Agustus 2005	Damai Datang, Proyek pun Terbilang

Sumber: *Gatra*, yang disusun kembali oleh peneliti

Dari dua berita yang disajikan oleh kedua media tersebut menimbulkan opini publik yang mejemuk mengenai MoU GAM-RI, hal tersebut dikarenakan adanya

B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari paparan pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana majalah Tempo dan Gatra mengemas pemberitaan realitas sosial Nota Kesepahaman GAM-RI ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembingkaian tentang Nota Kesepahaman, antara Majalah Tempo dan Gatra?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui ideologi Tempo dan Gatra dibalik pemberitaan tentang Nota Kesepahaman GAM-RI.
2. Mengetahui perbedaan apa saja yang mempengaruhi pembingkaian tentang Nota Kesepahaman GAM-RI, antara Majalah Tempo dan Gatra.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan kajian bagi yang meminati studi analisis *framing*. Analisis *framing* berkembang dari pandangan konstruksionis yang melihat bagaimana media dan berita dilihat dan pada akhirnya dapat mengetahui bagaimana masing-

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para khalayak untuk lebih mengetahui bagaimana berita itu disajikan dan dapat memahami bagaimana cara media mengemasnya.

E. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab perumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang sesuai dengan kajian masalah, sehingga dapat menghasilkan analisis yang valid dan kuat karena didukung oleh pembuktian teorinya. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bahasan besar, yaitu *'framing* dan pandangan publik' yang di dalamnya membahas tentang kaitan antara *framing* yang dilakukan oleh media yang akhirnya akan mempengaruhi opini atau penilaian publik terhadap suatu isu. Teori yang kedua, yaitu 'komunikasi sebagai produksi pesan dan makna' dimana pada teori ini menjelaskan tentang pemahaman pandangan konstruksionisme dalam melihat suatu realitas. Teori yang ketiga, yaitu 'realitas sosial dan ideologi' yang meliputi empat sub teori, antara lain adalah 'konstruksi realitas sosial' yang berisikan pemaparan secara singkat perbedaan antara pandangan positivisme dan konstruksionisme dalam melihat sesuatu, sub teori yang kedua adalah 'pendefinisian realitas' yang berisikan tentang peranan media dan wartawan dalam mendefinisikan sebuah realitas, dan sub teori yang ketiga adalah 'hal-hal yang

dijelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendefinisian sebuah realitas sosial oleh media, dan sub teori yang terakhir adalah 'realitas dan ideologi' yang mana dalam mendefinisikan sebuah realitas, media dan individunya tidak dapat meninggalkan ideologinya dalam memandang fakta.

E.1 *Framing* dan Pandangan Publik

Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo dalam Sobur 2004:161). Konsep *framing* media adalah penting sebab hal ini suatu alternatif pada "penyimpangan dan obyektifitas" paradigma lama, yang membantu kita memahami pelaksanaan komunikasi massa (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 96).

> Mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *framing* sebagai kepingan–kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2001:161-162).

Konsep *framing* dapat menawarkan suatu alternatif kepada paradigma yang menyimpang dan obyektifitas yang telah populer dalam riset mengenai komunikasi masa selama bertahun-tahun (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 96). Hackett berpendapat bahwa peneliti perlu menggeser fokus mereka dari studi penyimpangan dan obyektifitas kepada studi ideologi dalam berita.

> Konsep *framing* sebagai suatu pendekatan yang bermanfaat sebab hal itu berpotensi dalam membongkar dan membuka/ menampakkan asumsi yang tersembunyi. Konsep ideologi melebihi konsep penyimpangan. Ia membantah ideologi itu menyediakan suatu kerangka di mana media berita sering

Framing media merupakan hal yang penting, langkah yang halus/ cerdik tetapi berpengaruh kuat pada pendengarnya, bahkan dengan tujuan untuk membantu merobohkan seorang presiden (Stephen, Oscar, Grant, 2001: 97).

> Konsep *framing* memberikan wawasan baru dan pengaruh yang mendalam mengenai cara berkomunikasi yang praktis, termasuk wartawan, perencana kampanye komunikasi, dan aktivis sosial. Memilih *framing* untuk suatu cerita adalah keputusan paling utama bagi wartawan dalam editor surat kabar (Smith dalam Stephen, Oscar, Grant, 2001: 98).

Wartawan sering terbiasa memilih suatu bingkai permasalahan dengan cara memilih siapakah musuh atau saingan, berlawanan atau bertolak belakang dalam situasi ini wartawan membutuhkan penggunaan bingkai bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat diterima.

> *Framing* pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita, cara melihat berpengaruh pada hasil akhir dari kontruksi realitas sosial "Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media" (Eriyanto, 2002:10).
> *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, dalam Sobur 2001:162).

Peristiwa yang sama bisa diberitakan berbeda oleh media, seperti misalnya kasus di KPU, ada media yang memberitakan bahwa Mulyana W Kusuma (anggota KPU) adalah seorang koruptor yang ingin memberi sogokan pada salah seorang anggota KPK. Tetapi ada juga media yang memberitakan bahwa Mulyana W Kusuma

peristiwa yang sama akan tetapi berita yang tampil berbeda, perbedaan itu terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media. Ada dua esensi utama dari *framing* tersebut yaitu:

"*Pertama,* bagaimana peristiwa itu dimaknai, ini berhubungan mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. *Kedua,* bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan" (Eriyanto, 2002: 10).

> *Framing* sebagai proses yang tidak berhubungan dari strategi politis yang memanfaatkan keunggulan simbol atau lambang untuk mengambil bagian dalam memainkan perasaan sekitar isu kebijakan masyarakat. Kemudian, kita sudah berargumentasi bahwa *framing* adalah suatu bagian penting dari pandangan publik, dengan merubah situasi dan kunci permasalahan dalam menyusun analisa, membantu suatu gambaran dengan menghubungkan berbagai pengertian dalam *framing* (Pan & Kosicki dalam Stephen, Oscar, Grant, 2001: 36).

Sehingga dari pembicaraan interaktif mencakup berita, diskusi di televisi, radio, percakapan melalui internet, kelompok berita dan media baru lainnya itu akan muncul berbagai isu, dan pada akhirnya akan memunculkan pandangan publik.

E.2 Komunikasi Sebagai Produksi Pesan Dan Makna

John Fiske (1990) melihat suatu realitas dapat dipahami dengan dua cara: *pertama,* komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Pandangan ini juga disebut sebagai pandangan positivistik. *Kedua,* komunikasi dilihat sebagai produksi pesan dan pertukaran makna atau disebut juga pandangan konstruksionis.

> *The structure of this reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of*

decode... the second school sees communication as the production and exchange of meanings. It is concerned with how messages, or texts, interact with people in order to produce meanings. That is, it is concerned with the role of texts in our culture" (Fiske, 1990: 2).

(Susunan buku ini menggambarkan fakta- fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi, pertama komunikasi dilihat sebagai proses pengiriman pesan, ini berhubungan dengan bagaimana pengirim dan penerima pesan... kedua ilmu komunikasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna, ini berhubungan dengan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan khalayak dalam produksi makna, untuk itu titik perhatianya dengan aturan teks itu dalam budaya kita).

Pandangan positivis melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan, proses tersebut terjadi bagaimana pesan terkirim dari pengirim ke penerima bagaimana proses yang terjadi dalam pengiriman tersebut.

Shanon dan Weaver menyebut model ini dengan istilah lain yaitu komunikasi transmisi.

> Komunikasi transmisi suatu sumber yang menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima dan sipenerima mencipta ulang atau menyandi balik pesan tersebut. Komunikasi transmisi bersifat *linier*, karena melihat komunikasi mengalir dari komunikator ke komunikan, kemudian komunikator dilihat sebagai pihak yang aktif sedangkan komunikan sebagai pihak yang pasif. Dalam model ini, komunikasi transmisi menitik beratkan pada bukan bagaimana komunikan menerima pesan, akan tetapi sejauh mana pesan yang dimaksudkan oleh komunikator sesuai dengan yang diterima oleh komunikan (Shanon dan Weaver dalam Nightingale, 1996: 31).

Sehingga yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana pesan dari komunikator bisa sampai ke komunikan, dalam proses ini tentu saja pesan yang disampaikan dengan yang diterima belum tentu sama

Secara umum model komunikasi transmisi menyertakan pengirim (*sender*),

(*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman tersebut. Dalam konteks media cetak, medium adalah percetakan yang menghasilkan suatu surat kabar atau media cetak, pengirim (*sender*) adalah wartawan atau editor dan penerima pesan adalah setiap individu yang membaca media cetak tersebut. Sedangkan *noise* atau gangguan terjadi di antara proses tersebut, gangguan tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh, tulisan yang buram sehingga tidak dapat dibaca, salah penulisan sumber berita, salah ketik dan lain-lain.

Penggambaran proses komunikasi seperti ini terlihat *mekanistis* dan *simplistik*. Ketika komunikasi berlangsung individu yang mengirim sandi (*code*) dan proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyandian pesan agar dapat diterima dan dipahami oleh individu penerima. Sedangkan proses menerima pesan pada dasarnya adalah proses mengurai sandi (*decode*) dan menyandi ulang agar dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan pengirim (Lewin dan Slade dalam Eriyanto, 2002: 38-39).

Maksud pengiriman pesan mungkin, diberitahukan atau tidak diberitahukan, sadar atau tidak sadar, tetapi harus diperoleh dari analisa. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim ke penerima dengan pemahaman yang luas (Fiske 1990:3).

Penyampaian pesan bukan hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari A ke B saja, tetapi pesan sudah dipengaruhi oleh realitas yang berada diluar pesan itu. Pesan tidak dilihat secara paralel atau linier semata tapi pesan itu sudah dinamis, dimana ada pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam.

The message, then, is not something sent from A to B, but an element in a stuctured relationship whose other element include external reality and the producer/ reader. Producing and reading the text are seen as paralel, it not idential, processes in that they occupy the same place in this struktured relationship. We minght modeel this structure as a triangle in which the arrows represent constant interaction; the structure is not static but a dynamic practice (Fiske, 1990:3-4).
(Pesan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, tetapi

pembuat/ pembaca. Membuat dan membaca teks tidak semata secara paralel, jika tidak serupa, proses itu menempati tempat yang sama dalam struktur hubungan. Kita dapat lihat model hubungan ini sebagai segitiga dimana anak panah menunjukan intreaksi yang konstan hubungan ini tidak statis tapi sebuah praktek yang dinamis).

Gambar 1.1 ***Message and Meanings***

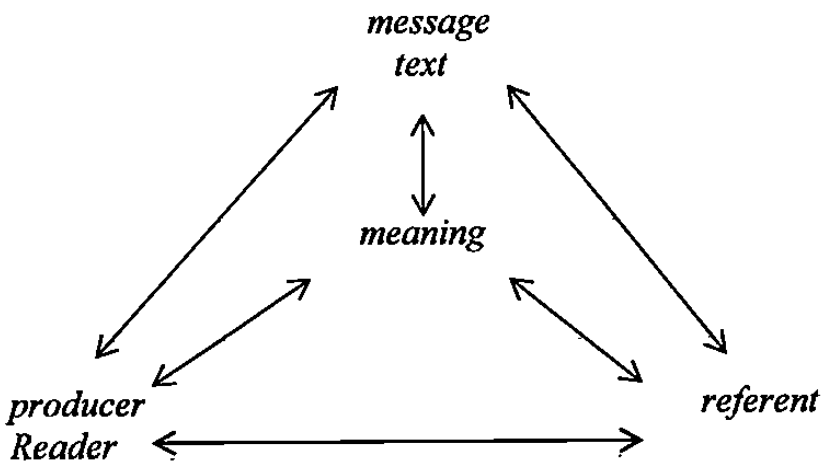

Sumber: John Fiske. *Introduction to Communication Studies*, (1990: 4).

Berbeda dengan pandangan positivis, pandangan konstruksionis melihat bahwa komunikasi adalah proses produksi dan pertukaran makna. Titik fokus dari pandangan ini adalah bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima (Eriyanto, 2002:40).

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis.

Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan. *Kedua,* pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa

ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan (Burton dalam Eriyanto, 2002:41-42).

Setiap individu merangkai perkataan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. Setiap komunikator akan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri dalam menyampaikan pesan.

E.3 Realitas Sosial dan Idelogi dalam pandangan konstruktivisme & positivisme

E.3.1 Konstruksi Realitas Sosial

> Konsep konstruksionisme pertama kali dikenalkan oleh ahli sosiolog interpretatif, Peter R Berger dan Thomas Luckman, dan kemudian dikenal sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial digambarkan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang dimana individu menciptakan terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subyektif (Burhan, 2001: 10).

Realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang ditakdirkan dari yang kuasa, akan tetapi realitas terjadi karena dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Oleh karenanya setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas (Berger dalam Eriyanto, 2002:14). Paradigma atau gagasan dari konstruksionis mengenai konstruksi realitas dalam teks berita di media cetak dipandang sebagai konstruksi atas realitas, karena suatu peristiwa yang sama berpotensi untuk di konstruksi secara berbeda oleh berbagai media. Sebagai contoh, dalam satu peristiwa, wartawan bisa saja mempunyai pandangan dan konsep yang berbeda-beda melihat suatu peristiwa tersebut, hal seperti itu dapat dilihat dari

bagaimana wartawan dalam mengkonstruksi peristiwa tersebut untuk ditulis kedalam bentuk berita.

Proses konstruksi realitas, tiga tahapan peristiwa:

> *Pertama* eksternalisasi. Eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun kegiatan fisik. *Kedua* objektivasi. Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari hasil kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. *Ketiga* Internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Berger dalam Eriyanto, 2002:14).

Pendekatan konstruksionis mempunyai aturan tersendiri dalam menilai bagaimana media cetak, wartawan dan berita dilihat. *Pertama* peristiwa merupakan hasil dari konstruksi.

> Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan, kemudian realitas juga tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda (Herbert dalam Eriyanto, 2002:19).

Menurut pandangan konsepsi positivis, realitas ada yang bersifat eksternal, jadi realitas itu ada dan hadir sebelum wartawan itu tiba. Kemudian realitas juga ada yang bersifat objektif, artinya peristiwa yang terjadi harus diambil dan diliput oleh wartawan secara utuh tanpa mengurangi atau menambahkan salah satu detail yang terjadi di lapangan. Konsepsi positivis bertentangan dengan konsepsi konstruksionis, fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal mengambil, ada dan menjadi bahan

Konstruksionis melihat bahwa media adalah sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang dibaca oleh khalayak umum bukan hanya menggambarkan realitas, dan bukan hanya menujukan pendapat sumber berita, akan tetapi telah terjadi konstruksi dari media cetak tersebut. Berbeda dengan pandangan positivis, dalam pandangan positivis media dilihat sebagai saluran. Positivis menganggap bahwa media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan oleh komunikator ke komunikan atau penerima (khalayak). Misal ada berita menyebutkan ada kelompok tertentu menggambarkan realitas dengan citra tertentu , maka gambaran tersebut merupakan hasil dari sumber berita (komunikator) yang menggunakan media untuk mengemukakan pendapatnya (Eriyanto, 2002:23).

Kedua konsepsi antara konstruksionis dengan positivis sangat bertolak belakang. Konstruksionis melihat bahwa media cetak hasil konstruksi realitas yang terjadi melalui berbagai instrumen media masing-masing, sedangkan positivis menganggap bahwa media cetak adalah hasil pesan dari komunikator yang disampaikan ke penerima pesan (pembaca).

Tabel 1.4 Perbedaan pandangan konstruksionis dan positivis

Konstruksionis	Media sebagai agen konstruksi pesan
Positivis	Media sebagai saluran pesan

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 23).

Ketiga berita adalah konstruksi dari realitas.

Pandangan positivis melihat berita sebagai informasi. Berita hadir kepada publik sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan yang terjadi oleh wartawan ditulis kembali dan diformasikan dalam bentuk berita. Pandangn konstruksionis, berita diibaratkan seperti sebuah drama. Berita bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai

Pandangan positivis berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas (*mirror of reality*), karena berita harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana berita selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan. Bagaimana realitas dijadikan suatu berita tergantung bagaimana fakta tersebut dipahami dan dimaknai oleh wartawan.

Tabel 1.5 Perbedaan pandangan konstruksionis dan positivis

Konstruksionis	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
Positivis	Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Oleh karena itu, berita haruslah sama dan sepadan dengan fakta yang hendak diliput.

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto2002: 25).

Keempat berita bersifat subjektif. Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang *rigid*, hal ini terjadi karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas peristiwa.

> Pandangan konstruksionis melihat Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa saja berbeda, sebab ukuran yang baku dan standar tidak bisa dipakai. Kalau ada perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya maka hal tersebut bukan dianggap sebagai kesalahan, akan tetapi memang seperti demikian pemaknaan realitas Sedangkan Pada konsepsi positivis, positivis lebih memperhatikan pada titik kekeliruan atau bias berita. Artinya, bila terjadi bias pada pemberitaan hal ini dianggap sebagai suatu kesalahan, dan wartawan harus menghindari bias tersebut. Seandainya terjadi bias pada berita, positivis memandang harus cepat menyelesaikan dan menemukan dimana letak terjadinya bias tersebut. Oleh karenya terjadinya bias berita

peliputan yang terbatas bagi wartawan, keterbatasan *space* yang diberikan, kekeliruan wartawan dalam penulisan dan sebagainya (Eriyanto, 2002:27).

Hal inilah titik perbedaan antara konsepsi konstruksionis dengan positivis, seperti penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber berita yang lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain kesemuannya oleh konsepsi konstruksionis dianggap bukan suatu kesalahan atau bias, melainkan memang demikianlah praktik yang dijalankan oleh wartawan dalam menuliskan suatu berita. Hal seperti ini justru dimaknai sebagai bentuk kekeliruan atau bias oleh konsepsi positivis.

Tabel 1.6 Perbedaan Pandangan Konstruksionis dan Positivis

Konstruksionis	Berita bersifat subjektif: opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif
Positivis	Berita bersifat objektif: menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 27).

Kelima, wartawan bukan pelapor. Pesan adalah realitas itu sendiri. Seorang jurnalis yang baik adalah memiliki kemampuan untuk memindahkan realitas kedalam bentuk berita. Wartawan dapat menyajikan realitas secara benar, apabila wartawan tersebut profesional.

Pandangan konsepsi positivis berita dilihat sebagai cerminan dari realitas. Wartawan yang profesional bisa menyingkirkan keberpihakan sehingga apa yang diungkapkan adalah murni fakta, bukan penilaian individu wartawan. Tetapi hal demikian ditentang oleh pandangan konstruksionis, sebab dalam

pilihan moral dan keberpihakan, sebab wartawan adalah aktor yang ikut andil bagian dalam terbentuknya sebuah berita. Pandangan konstruksionis juga melihat berita bukan hanya produk individual, melainkan bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawan dengan media tersebut. Oleh karena itu pandangan konstruksionis disebut juga sebagai agen konstruksi, sebab wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa (Curran dalam Eriyanto, 2002:28).

Tabel 1.7 Perbedaan Pandangan Konstruksionis dan Positivis

Konstruksionis	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial
Positivis	Wartawan sebagai pelapor atau *Observer.*

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 29)

Keenam, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita.

Pendekatan positivis menekankan agar nilai, etika, dan keberpihakan wartawan dihilangkan dalam proses pembuatan berita. Realitas haruslah didudukkan dalam fungsinya sebagai realitas yang faktuil, yang tidak boleh dikotori oleh pertimbangan subjektif. Wartawan disini fungsinya hanyalah sebagai pelapor yang hanya menjalankan tugas untuk memberikan fakta dan tidak diperkenankan munculnya pertimbangan etika, moral, atau nilai tertentu. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis, wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media dan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas (Eriyanto, 2002:31-32).

Tabel 1.8 Perbedaan Pandangan Konstruksionis dan Positivis

Konstruksionis	Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
Positivistik	Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada di luar proses peliputan berita.

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 32)

Ketujuh, Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam penelitian. Begitu etika dan moral masuk dalam sebuah penelitian maka hal tersebutakan berpengaruh pada hasil penelitian.

> Salah satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstrukrsionis adalah pandangan yang menyatakan bahwa peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan positivistik. Dalam pandangan ini, peneliti haruslah bebas nilai, ini berarti etika dan pilihan moral peneliti tidak boleh ikut dalam penelitian karena akan mempengaruhi hasil penelitian (Eriyanto 2002:33).

Tabel 1.9 Perbedaan Pandangan Konstruksionis dan Positivis

Konstruksionis	Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.
Positivistik	Nilai, etika, opini dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian.

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 35).

Kedelapan, Khalayak memiliki penafsiran tersendiri atas berita. Menurut (Hall, dalam Eriyanto, 2002:36). Konstruksionis mempunyai pandangan bahwa khalayak bukanlah subjek yang pasif, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dibacanya.

Makna dari suatu teks berita bukan terdapat dalam suatu pesan atau berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu mempunyai banyak arti (*polisemi*), makna lebih tepat dipahamai bukan sebagai transmisi atau penyebar dari pembuat berita ke

karena setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama. Kemudian pandangan positivis melihat berita sebagai suatu yang objektif, sehingga konsekuensinya adalah apa yang diterima oleh khalayak pembaca seharusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh pembuat berita. Pandangan positivis memberikan kesan bahwa pembuat berita dinyatakan sebagai pihak yang pasif.

Tabel 1.10 Perbedaan Pandangan Konstruksionis dan Positivis

Konstruksionis	Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri yang memungkinkan penafsiran tersebut berbeda dengan pembuat berita.
Positivis	Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita.

Sumber : *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Eriyanto 2002: 35)

Dalam penelitian konstruksionis, dianggap tidak ada realitas, yang ada adalah konstruksi media atas realitas. Berbicara tentang rekonstruksi realitas media tidak terlepas dari agenda setting yang dilakukan media. Stephen D. Resse, Oscar H Gandy, Jr, dan August E. Grant dalam buku mereka yang berjudul *Framing Public Life* mengemukakan bahwa dalam *agenda setting* terbagi menjadi dua level. *"The first level of agenda setting is the transmission of obyek salience, and the second level is the transmission of attribute salience"* (Stephen, Oscar, Grant, 2001:69). Level pertama *agenda setting* adalah pengiriman obyek yang menonjol dan level kedua

Pada level kedua *agenda setting* menunjukkan bahwa media menyampaikan pada khalayak bagaimana cara berpikir tentang suatu obyek. *"Explicit attention to the second level, attribute agenda setting, further suggest that media also tell us how to think about some object. It is here the agenda setting and framing share common ground"* (Stephen, Oscar, Grant, 2001:69). Pemberian atribut pesan yang menonjol pada media merupakan bagian dari proses *framing* media. Ada pertemuan antara *agenda setting* dan *framing* dimana level kedua dari *agenda setting* merupakan bagian dari proses *agenda setting*.

Agenda setting memainkan peran yang sangat penting dalam proses rekonstruksi realitas yang media lakukan. Rekonstruksi realitas yang dilakukan media diwujudkan dalam proses *framing* media. Pada proses ini terdapat level kedua *agenda setting* yaitu pemberian atribut pesan yang menonjol.

> *Frames that are attributes of communication presentations and frames that are attributes of the objects being presented in the content. Focusing on the characteristics of the objects that are the subject matter of mass media message as well as individuals' thoughts and remarks, our explication noted that these object attributes can be identified as either cognitive or affective attributes and both can be arrayed along a micro-macro continuum. Frames typically are macro-attributes, often containing a mix of cognitive and affective elements. Frames further can be distinguished as attributes that describe aspects of an object, or as attributes that characterize the dominant traits of an object and are the central theme of a particular message* (Stephen, oscar, Grant, 2001: 78).
>
> (*Frame* yaitu atribut presentasi komunikasi dan frame adalah atribut obyek yang diperkenalkan pada isi. Memfokuskan pada karakteristik dari obyek yaitu materi subyek pada pesan media massa seperti halnya pemikiran-pemikiran dan komentar-komentar individu, catatan kami menegaskan bahwa atribut obyek ini dapat dikenali seperti salah satunya pada atribut kognitif atau

dan makro. Ciri khas dari *frame* adalah atribut makro, sering birisi campuran dari elemen-elemen kognitif dan afektif. *Frame* dibedakan lebih lanjut ketika atribut yang menguraikan aspek dari suatu obyek, atau suatu atribut yang menandai ciri yang dominan dari suatu obyek dan itu adalah tema pusat dari bagian pesan).

Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 1.2 Proses *Framing* Media

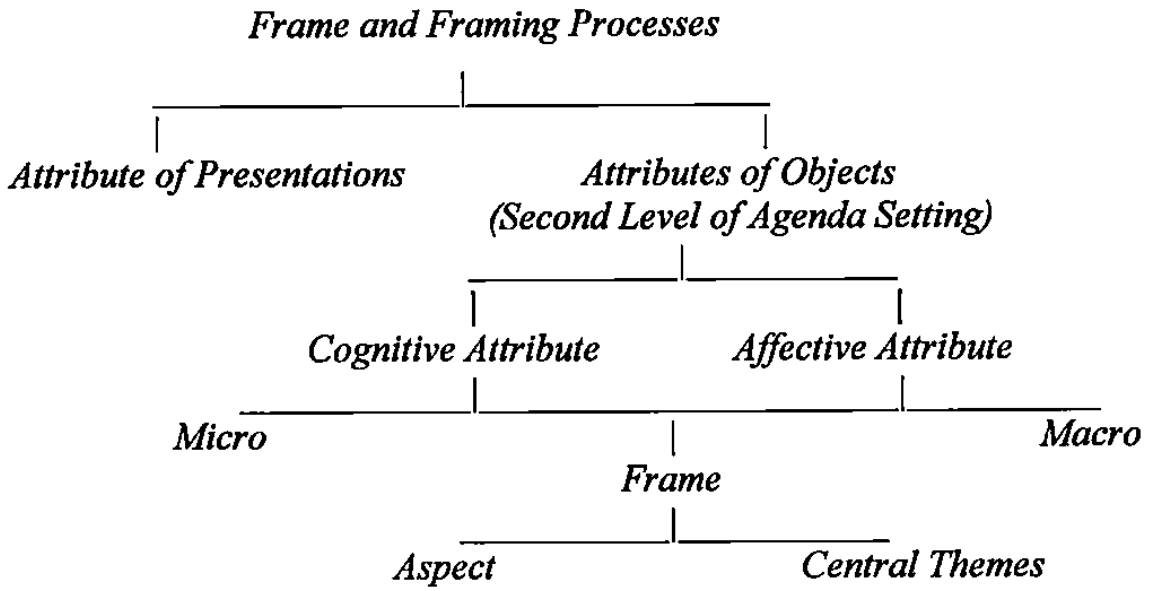

Sumber: *Framing Public Life: Perspektives Media and our Understanding of the Social World (Stephen, Oscar, Grant, 2001:71).*

E.3.2 Pendefinisian Realitas

Media cetak mempunyai andil yang besar dalam mendefinisikan realitas. Bagaimana wartawan membingkai realitas dengan pilihan-pilihan kata akan mempengaruhi bagaimana fakta yang ditampilkan wartawan tersebut dapat dipahami dan dimaknai. Oleh karena itu, bagaimana media cetak memakanai peristiwa yang

ada dua cara yang akan dilakukan oleh media. Pertama, pemilihan fakta, kedua menuliskan fakta.

> Proses pemilihan fakta didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa pada perspektif. Dalam memilih fakta terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Dalam proses menuliskan fakta berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan ke khalayak. Gagasan tersebut diungkapkan dengan kata, kalimat, proposisi dan bantuan aksentuasi foto dan gambar (Fairclough, 1992:89).

Bagaimana mendefinisikan realitas sebenarnya tidak jauh bagaimana subjektifnya wartawan yang meliput dilapangan. Pendefinisian ini berkaitan dengan bagaimana wartawan memandang peristiwa yang terjadi, bagaimana pemilihan kata yang akan dibahasakannya dalam berita, atau pilihan gambar, foto yang akan memperkuat prasangka khalayak pada suatu peristiwa yang akan diliput. Kemudian yang tidak dapat ditinggal adalah bagaimana pemilihan sumber yang akan memperkuat dugaan pada peritiwa yang terjadi.

Proses pemilihan fakta tidak terlepas dari bagaimana media cetak memaknai berita atau peristiwa tersebut. Wartawan-lah yang mempunyai andil besar dalam pemilihan peristiwa dan nara sumber yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita. Peristiwa yang sama mungkin saja disajikan secara berbeda antara wartawan satu dengan wartawan yang lain, hal ini disebabkan karena realitas dipahami secara berbeda-beda.

> Proses penulisan fakta sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa di dalam menulis realitas. Kata-kata yang digunakan oleh media bukan saja mengikuti kode etik jurnalistik, akan tetapi terkait dengan politik bahasa

> Pemilihan bahasa dalam kata-kata tertentu dapat menciptakan realitas yang tertentu pula. Kata-kata tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu tetapi juga membatasi persepsi pembaca dan mengarahkan pada cara berpikir dan keyakinan tertentu (Burke dan Kenneth, 1992:31).

Kalimat atau kata yang hadir pada khalayak mencoba memberikan gambaran peristiwa pada khalayak untuk mengetahui realitas. Hendaknya realitas tersebut dipahami sebagai sekedar kata yang mencoba didefinisikan oleh media, karena jika memahami realitas tersebut dengan gambaran yang diberikan oleh media maka akan ada realitas lain hadir berdasarkan persepsi dan konstruksi realitas individu lain. Misalnya kata restrukturisai dan pergantian akan memiliki makna dan pemahaman yang berbeda. Kata restrukturisasi lebih terkesan sopan dan tidak menyinggung perasaan, lain lagi bila dibandingkan dangan pergantian terkesan angkuh dan egois.

Apa yang dilaporkan media seringkali merupakan hasil dari pandangan mereka (predisposisi perseptuil) wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa (Eriyanto, 2002:83), sehingga dengan menggunakan analisis *framing* akan dapat mengetahui sebuah peristiwa yang sama dikemas secara berbeda oleh wartawan yang menghasilkan berita berbeda.

E.3.3 Hal-hal yang Mempengaruhi Pendefinisian Realitas Suatu Media

Sebuah berita tidak sama persis dengan apa yang terjadi dilapangan. Proses pembentukan sebuah berita diruang redaksi, tidak dapat dibayangkan sebagai proses

berita yang dimuat sudah melalui berbagai proses yang panjang dan rumit, dan telah dipengaruhi oleh banyak faktor.

Karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudibyo, 2001: 7).

Ada lima faktor yang mempengaruhi pendefinisian sebuah realitas sosial oleh media:

> *Pertama* faktor individual. Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesionalisme pengelola media. Latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, budaya akan mempengaruhi pola pemberitaan (Shoemaker & Reese, 1996:102).

Media dalam menurunkan sebuah berita selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek personal wartawan dan pengelola media, dampak dari hal tersebut media akan memutuskan mana yang akan dimuat dan mana yang tidak akan dimuat untuk dijadikan sebuah berita.

> *Kedua*, rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita, rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk melalui proses dan tangan siapa saja sebelum sampai ke proses cetak (Shoemaker & Reese, 1996:137).

Jika media menampilkan aspek tertentu bukan berarti media tersebut memerankan peran negatif dalam proses pembentukan produksi berita untuk mengelabui publik. Hal demikian bisa saja terjadi, namun semua proses seleksi terjadi karena rutinitas kerja keredaksionalan yang dianggap sebagai suatu bentuk rutinitas organisasi media. Kemudian disinilah seorang redaktur memegang sebuah

kendali pemberitaan, redaktur memiliki otoritas penuh atas pemilihan suatu peristiwa yang layak atau tidak layak untuk dijadikan sebuah berita.

> *Ketiga,* sebuah pembentukan berita dipengaruhi oleh institusi media. Wartawan, editor, layouter dan fotografer, adalah bagian kecil dari institusi media. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang menentukan sebuah berita, lebih dari itu, ada aspek lain yang mempengaruhi seperti bagian pemasaran, pengiklan dan pemodal (Shoemaker & Reese, 1996:172-173).

Beberapa hal tersebut sangat mempengaruhi sebuah peristiwa untuk dijadikan berita. Kepentingan ekonomi seperti pemilik modal, pengiklan dan pemasaran selalu mempertimbangkan sebuah peristiwa yang dapat menaikan angka penjualan atau oplah media. Misalnya, salah satu pejabat melakukan korupsi. Kalau peristiwa tersebut memiliki bobot berita yang dapat menaikan tiras penjualan, maka berita tersebut harus dijadikan sebagai *headline* dalam medianya. Meskipun diketahui bahwa pejabat tersebut adalah salah satu pemilik modal dan saham dimedianya.

Keempat, ekstramedia. Pada level ini, kenyataannya sebuah media hanya bagian dari sistem yang besar, kompleks yang sedikit banyaknya dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada tiga faktor diluar lingkungan media yang mempengaruhi pemberitaan yaitu:

> Faktor pertama yang datang langsung dari sumber berita.
>
> Sumber berita tidak dilihat sebagai pihak yang netral dalam memberikan informasi berita. Sumber berita tentu saja memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberitakan informasi yang sekiranya baik bagi

Sumber informasi juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan alasan-alasan tertentu, misal sumber berita memberikan informasi kepada khalayak untuk membentuk dan membangun citra positif agar khalayak atau publik turut mendukung argumentasi pembenarannya.

Faktor sumber Penghasilan Media. Pada tahapan ini sebuah institusi media dalam menentukan kelanggengannya, media membutuhkan dana dalam hal ini adalah iklan. "Untuk bertahan hidup kadang kala media harus berkompromi dengan sumberdaya yang menghidupi mereka. Misalnya media tidak akan memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan iklan" (Sudibyo, 2002:11). Akibatnya pemberitaan akan tunduk dan patuh terhadap pengiklan, kemudian yang terjadi adalah subjektifitas media akan terancam. Bagaimanapun media tidak memiliki opsi lain apa bila keburukan dari salah satu pelanggan iklan dijadikan suatu kasus atau bahan pemberitaan ke publik, maka pengiklan tidak segan-segan untuk *mengembargo* media tersebut dengan cara berhenti langganan atau menjadi pelanggan iklan tetap.

Faktor pihak eksternal media. Seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.

> Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Dalam negara yang oteriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Ini karena dalam negara yang otoriter, negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan (Sudibyo, 2001:12).

Sehingga media jika ingin tetap terbit harus selalu mengikuti aturan-aturan

yang demokratis, campur tangan negara praktis tidak ada, justru yang besar adalah pengaruh dari lingkungan pasar dan bisnis.

> *Kelima*, level ideologi. Dalam konteks ini, ideologi diartikan sebagai kerangka pikir yang dipakai oleh setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana individu tersebut menghadapinya. Ideologi pada tataran ini adalah suatu konsep yang abstrak, yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan suatu realitas. Ideologi yang abstrak diartikan sebagai siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan bagaimana media tersebut akan dipahami oleh publik (Shoemaker & Reese, 1996:251).

Pada level ideologi, media berhak menentukan apa yang akan ia sajikan kepada publik, pada saat itu media akan menerapkan kekuasaannya untuk membentuk opini khalayak sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan dalam media terkait bagaimana jurnalis didikte dan dikontrol dalam memberitakan peristiwa dengan perspektif tertentu.

Misal, komunis adalah ideologi terlarang pada masa era Orde Baru.Oleh karena ideologi tersebut terlarang, maka setiap institusi media tidak memberanikan diri untuk memberitakan hal-hal yang bersangkut paut dengan komunis.

E.3.4 Realitas dan Ideologi

Ideologi menurut arti kata ialah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan dari yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran (Sukarna, 1981:1)

Ideologi dianggap sebagai kesadaran palsu, sistem berfikir yang sudah terkena

sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaan secara tidak wajar (Magnis-Suseno dalam Sobur, 2001:66).

Ideologi sebagai kesadaran palsu secara kontinu diafirmasi media massa. Tragisnya, masyarakat menganggap semua yang ditampilkan media masa merupakan cermin realitas sosial, menjadi aksioma yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya (Sukirman, 2005).

> Setiap mendefinisikan realitas individu tidak dapat meninggalkan ideologinya dalam memandang fakta. Ideologi adalah pemahaman yang abstrak, sehingga pemahaman tersebut diterjemahkan secara berbeda oleh setiap individu. Perbedaan yang terjadi pada tiap individu dipengaruhi atas pengetahuan yang sudah terkontaminasi dengan perasaan, kepentingan, dan faktor-faktor yang lain, sehingga pengetahuan yang subjektif itu dinamakan dengan ideologi (Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2000:156).

Tidak ada batasan-batasan pada ideologi, baik jangkauannya terhadap semua aspek kehidupan kita maupun historis.

> Kekuatan ideologi terletak pada kemampuan untuk melibatkan kelompok subordinat dalam prakteknya sehingga membawa mereka untuk mengkontruksi identitas sosial/ subjektifitas untuk mereka sendiri yang mereka terlibat didalamnya, dan melawan kepentingan-kepentingan sosial politik mereka sendiri (Althusser dalam Fiske, 1990: 228).

Ideologi tidak selalu harus dikaitkan dengan ide-ide besar, ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan. Bagaimana kita melihat peristiwa dengan kacamata dan pandangan tertentu, dalam arti luas adalah sebuah ideologi (Eriyanto, 2002:130)

> Diantara berbagai fungsi dari media dalam mendefinisikan realitas adalah ideologi sebagai mekanisme integrasi sosial. Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu

pandangan atau nilai harus didefinisikan sehingga keberadaannya diterima dan diyakini kebenarannya (Eriyanto, 2002:122).

Gambaran atau ilustrasi menarik untuk menjelaskan bagaimana berita ditempatkan dalam peta ideologi. Ada tiga bidang ideologi dalam jurnalistik mengenai berita.

> *Pertama,* bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), *kedua,* bidang kontroversi *(Sphere of legitimate controversi)* dan *ketiga* adalah bidang konsensus (*sphere of consensus*). Ketiga bidang ideologi tersebut dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologi pembaca (Hall dalam Eriyanto, 2002:127).

Gambar 1.3 Peta Ideologi

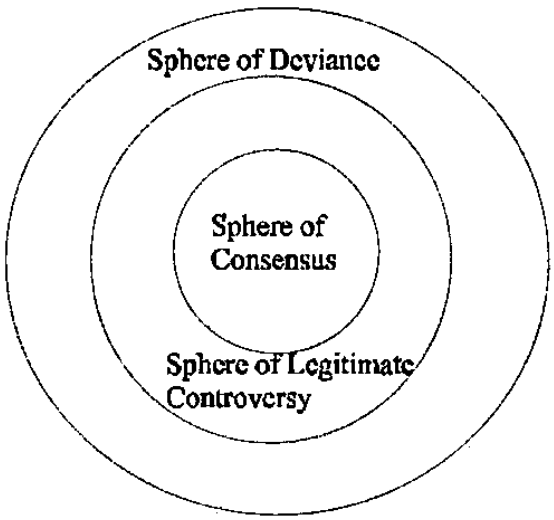

Sumber : Shoemaker & Reese. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, (1996: 227).

Bidang-bidang tersebut dapat menjelaskan bagaimana realitas dapat dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis. Bidang penyimpangan memberikan gambaran dimana peristiwa disepakati secara umum

dalam masyarakat sebagai sebuah tindakan yang dipandang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bidang ketiga adalah konsensus. Konsensus menunjukan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka teori, objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data maka dapat disimpulkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu "jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain" (Strauss dan Carbin 2003:4).

Paradigma konstruksionisme memandang teks media merupakan hasil dari konstruksi media terhadap realitas". Realitas bukanlah sesuatu yang terberai, seakan-akan ada, tetapi realitas sebaliknya diproduksi" (Carey dalam Eriyanto, 2002:19-20). Paradigma konstruksionisme mempunyai empat sifat, yaitu:

> *Pertama:* Secara ontologis bersifat relatif dengan memahami realitas merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
> *Kedua:* Secara epistimologi bersifat transaksional/subyektif maksudnya pemahaman tentang sesuatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
> *Ketiga:* Secara metodologis bersifat refliktif dialektik. Pendekatan konstruksionis menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti

metode kualitatif, peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan obyek yang diteliti.
Keempat: Secara axiologis pendekatan ini memandang nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *passionate participant.* Fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial (Guba dan Lincoln, dalam Salim, 2001: 48-49).

Analisis yang bisa digunakan untuk mengungkap konstruksi yang dilakukan media (berita atau isu mengenai nota kesepahaman atau MoU antara GAM-RI pada Majalah Tempo dan Gatra) salah satunya adalah analisis *framing*. Analisis *Framing* adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi dan dibentuk oleh media, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, dalam hal ini bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada khalayak pembaca, namun pada akhirnya peneliti tidak membandingkan sejauh mana antara konstruksi realitas dengan realitas sebenarnya, tetapi bagaimana konstruksi antar berbagai majalah dalam memaknai suatu realitas.

Penelitian ini melakukan analisis isi teks media dengan menggunakan paradigma konstruksionisme dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis data framing.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah dua majalah, yaitu Majalah Tempo dan Gatra pada bulan Agustus 2005. Pemilihan bulan tersebut karena bertepatan dengan proses

berbeda dalam menerjemahkan tersebut, dan menjadikan alasan mendasar dalam penelitian ini. Majalah dalam menyajikan berita dan cenderung sesuai dengan fakta realitas yang ada dan penekanan beritanya lebih tajam, sedangkan majalah Gatra cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus dalam mengemas suatu berita dan menyajikannya kembali sebagai realitas baru. Selain itu, melihat pada latar belakang berdirinya majalah Gatra yang merupakan perpecahan dari majalah Tempo pasca peristiwa pembredelan Tempo 1994, menjadi kasus yang menarik untuk diangkat karena mengingat sejarah mereka yang dulu berasal dari satu Redaksi yaitu Tempo, namun kini harus bersaing dalam mengedepankan mutu jurnalistik serta menjadi perusahaan media yang sehat dan modern. Adanya perbedaan pemberitaan antara Tempo dan Gatra kasus yang sama akhirnya akan mempengaruhi opini dan penilaian publik atas isu tersebut. Alasan lain yang mendasari menggunakan dua media cetak tersebut adalah keduanya merupakan majalah berskala nasional.

3. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian ini dilakukan pada majalah Tempo dan Gatra edisi bulan Agustus 2005, karena bertepatan dengan disepakatinya MoU perdamaian oleh kedua belah pihak.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi

mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan catatan yang dimiliki oleh unit analisis, sehingga dapat dimanfaatkan data serta melengkapi data.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus (Surakhmad, 1982: 163). Adapun data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak dua buah berita dari majalah Tempo dan Gatra edisi bulan agustus 2005 tentang perjanjian damai RI-GAM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Anwar, 2001: 35). Guna melengkapi data, peneliti juga mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, internet, jurnal serta dari berbagi surat kabar yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*. Analisis framing yang mencoba menangkap segala bentuk pemberitaan dan bagaimana

> *Framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang di terima dan membuat peristiwa itu menonjol dalam suatu teks komunikasi. Framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi, dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga tentu mendapatkan alokasi lebih besar dari berita yang lain. framing dalam dua dimensi besar, dimensi pertama adalah selesksi isu dan kedua adalah penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu (Entman dalam Nugroho, Eriyanto, Surdiarsis, 1999:21).*

Penonjolan pada aspek tertentu merupakan suatu proses membuat informasi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Pemberian judul yang bombastis dipergunakan oleh media cetak untuk menarik perhatian khalayak, praktik seperti ini di media cetak hal adalah salah satu bagian dari aspek penonjolan supaya berita yang menjadi *headline* dapat menarik perhatian pembaca. Penempatan judul yang dijadikan *headline* di halaman muka atau belakang, pengulangan kata, pemberian foto atau gambar tertentu adalah salah satu praktik penonjolan dari dimensi seperti yang digambarkan oleh Entman dalam konsep *framing.*

> *Framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokan secara halus dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya (G.J. Adi Tjondro dalam Sudibyo, 1999:165).*

Analisis *framing* adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu

oleh media dalam menyajikan berita. Dalam melakukan frame, tiap-tiap media memiliki cara atau strategi masing-masing dalam menyajikan berita untuk mencapai tujuannya. Cara-cara tersebut merupakan bentuk politik yang dilakukan sebuah media untuk dapat bersaing dengan media-media lain dalam memperoleh pembaca. Politik pemberitaan yang dilakukan media juga berhubungan dengan ideologi yang dimiliki media tersebut. Sehingga dari berita-berita yang disajikan dapat diketahui ideologi dari sebuah media. Hal tersebut sama dengan tujuan dari analisis framing dimana analisis ini merupakan analisis untuk mengetahui ideologi dari media di balik pemberitaannya.

Penelitian ini akan menggunakan konsep *framing* model Zhongdang Pan dan Kosicki karena dalam model ini elemen yang digunakan untuk menganalisis data lebih lengkap dibandingkan dengan model–model yang lain. *Framing* dibagi dalam empat dimensi besar. Berikut ini adalah garis besar beberapa konsep *framing* secara rinci yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengungkap sebuah realitas isi pemberitaan dalam suatu media cetak.

> Setiap berita memiliki *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* adalah sebuah ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam bentuk teks secara keseluruhan, karena *frame* berhubungan dengan makna. Pembaca dalam memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks (Pan dan Kosicki dalam Sobur, 2001:175).

Pan dan Kosicki menggunakan perangkat *framing* dalam menganalisis teks berita dibagi menjadi empat struktur besar, yakni

1. Struktur Sintaksis

Struktur Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa kedalam pernyataan, opini, kutipan serta pengamatan peristiwa yang disusun dalam bentuk berita. Hal ini dapat diamati dalam penulisan *lead* yang dipakai, latar informasi, *headline*, serta kutipan yang diambil. Inti dari struktur sintaksis adalah mengamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara wartawan menyusun fakta.

> Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Sintaksis merujuk kepada pengertian susunan dari bagian seperti *headline*, *lead,* latar informasi, sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Sintaksis paling populer di kalangan wartawan dalam menyusun berita adalah struktur piramida terbalik. Struktur sintaksis berfungsi memberikan petunjuk tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak diarahkan kemana suatu berita akan dibawa (Eriyanto, 2002: 257)

Headline merupakan aspek sintaksis yang memiliki tingkat kemenonjolan cukup tinggi, karena menunjukan kecenderungan suatu berita, dan mempunyai tiga fungsi, yaitu mengiklankan berita, meringkaskan atau mengikhtisarkan cerita, dan memperbagus surat kabar (Anwar, 1996:11).

Headline dapat berfungsi mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dimengerti dan digunakan untuk menguraikan suatu isu dalam suatu peristiwa, *headline* berfungsi pula menjadi penjelas dalam berita, misalnya tanda tanya untuk menjelaskan sebuah pernyataan, tanda kutip untuk menunjukan adanya jarak

Lead adalah perangkat sintaksis lain untuk menunjukan perspektif tertentu dari suatu peristiwa yang diberitakan oleh media, dan merupakan intisari dari suatu berita (Sobur, 2001:77).

"Latar informasi dapat mempengaruhi bagian berita yang ingin ditampilkan. Seorang wartawan dalam menulis berita menggunakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis" (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:32). Pengutipan sumber berita, adalah bagian penulisan berita lain yang penting. Hal ini dapat dimaksudkan untuk membangun keseimbangan dalam tidak memihak terhadap suatu berita yang diperistiwakan dan pengutipan sumber bertujuan untuk menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan adalah bukan semata-mata pendapat wartawan, melainkan pendapat dari orang yang memiliki otoritas tertentu.

Pengutipan sumber menjadikan perangkat *framing* yang kuat atas tiga hal (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:33) antara lain:

> *Pertama,* mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Maksudnya adalah bahwa pendapat yang dikutip didukung oleh para ahli yang berkompeten walaupun sebenarnya wartawan mempunyai pendapat sendiri atas suatu peristiwa. *Kedua,* menghubungkan poin tertentu dari pandanganya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga* mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas, sehingga pandangan tersebut nampak sebagai suatu penyimpangan.

II.Struktur Skrip

Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5 W + 1 H *(Who, What, Where,*

namun kategori informasi diambil oleh wartawan untuk setiap penulisan dalam bentuk berita (Eriyanto, 2002:260). "Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa" (Sobur 2001:175-176). Ada dua hal berita yang disusun sebagai suatu cerita. *Pertama,* laporan berita yang berusaha menunjukan peristiwa lanjutan dari peristiwa sebelumnya. *Kedua,* setiap berita mempunyai orientasi untuk menghubungkan dengan lingkungan komunal pembaca (Eriyanto, 2002:260).

III. Struktur Tematik

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipergunakan dan penulisan sumber kedalam teks berita secara keseluruhan.

Dalam menulis berita, wartawan mempunyai tema atas suatu peristiwa tertentu. Pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran pembaca tentang suatu peristiwa, untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak akan kebenaran penulisan berita tersebut, maka wartawan menggunakan strategi elemen wacana sebagai berikut:

> *Detail.* Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh komunikator. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya komunikator akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit apabila hal itu merugikan kedudukannya. Informasi yang menguntungkan komunikator tidak hanya ditampilkan secara berlebihan, akan tetapi akan

serta ditambah dengan data-data untuk menonjolkan citra komunikator tersebut kepada pembaca. *Maksud*. Elemen wacana maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas, begitupun sebaliknya, apabila informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, tersembunyi, eufimistik dan berbelit-belit (Sobur, 2001:79).

Nominalisasi. Elemen ini berhubungan dengan pertanyaan apakah komunikator memandang objek sebagai suatu yang tunggal, berdiri sendiri ataukah sebagai suatu kelompok (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:34-35).

IV. Struktur Retoris

"Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra, meningkatnya suatu penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita" (Nugroho, Eriyanto, Sundiarsis, 1999:43). Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan oleh wartawan adalah kebenaran. Ada empat elemen struktur retoris yang dipergunakan wartawan yakni sebagai berikut.

Leksikon. Elemen ini menandakan bagaimana wartawan memilih kata dari berbagai kemungkinan kata atau frase yang tersedia (Sobur, 2001:82).

Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa sinonim yang merujuk pada fakta. Kata "Mati" misalnya memiliki sinonim: wafat meninggal, tewas dan lain

pilihan yang tersedia. Pilihan kata yang dipakai oleh seseorang wartawan tidak semata-mata karena kebetulan, tetapi secara ideologis menunjukan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap realitas.

Grafis. Elemen grafis difungsikan untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan.

> Dalam wacana berita grafis hadir melalui bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan yang lainnya. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, huruf dengan ukuran besar, pemakaian garis bawah, termasuk didalamnya adalah pemakaian caption, grafik, gambar, tabel, untuk mendukung arti penting suatu pesan yang ingin disampaikan ke pembaca, karena wartawan menginginkan pembaca menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut (Nugroho, Eriyanto, Sudiarsis, 1999:45).

Pengandaian. Elemen ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Pengandaian merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung suatu teks (Sobur, 2001:79).

Pengandaian hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya tidak perlu untuk diragukan. Pengandaian adalah strategi yang dapat memberi kesan berbeda ketika diterima pembaca. Misal, pemakaian kata "SBY menghimbau agar para pejabat pemerintah tetap tenang menghadapi kritik dari masyarakat" Kata-kata ini memberikan kesan bahwa para pejabat pemerintah sering menanggapi berlebihan dengan kritik yang di lontarkan masyarakat.

Metafora. Dalam suatu wacana seorang wartawan tidak hanya menyampaikan

Metafora dimaksudkan sebagai ornamen dari suatu berita. Pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora dipakai oleh wartawan untuk landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik (Sobur, 2001:84).

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membuat skema *framing* yang lebih dikenal dengan nama skema *framing* model Pan dan Kosicki, sebagai berikut:

Tabel 1.11 Skema *Framing* Model Pan dan Kosicki

STRUKTUR	**PERANGKAT *FRAMING***	**UNIT YANG DIAMATI**
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	*Headline, Lead,* latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5 W + 1 H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud 5. Nominalisasi 6. Koherensi 7. Bentuk Kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, Proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafora 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada skripsi ini, peneliti akan membagi kedalam empat bab, di mana bab I menjelaskan bagaimana kedua media cetak dalam menterjemahkan realitas sosial dalam bentuk isu politik nota kesepahaman atau MOU antara GAM – RI dimata publik pembaca. Analisis *framing* adalah perangkat teori yang diperlukan oleh peneliti untuk membedah pemberitaan disetiap media massa. Dengan menggunakan teori *framing* akan diketahui bagaimana suatu media membangun sebuah konstruksi peristiwa yang kemudian berkembang menjadi sebuah wacana ditengah masyarakat.

Pada bab II peneliti menuliskan profil media yang menjadi objek penelitian yaitu Majalah Tempo dan Majalah Gatra, mulai dari sejarah berdiri hingga perkembangannya saat ini. Kemudian pada bab III menjelaskan analisa data yang bahannya diperoleh dari kedua media cetak tersebut berupa berita-berita perjanjian damai RI-GAM yang dimuat pada bulan Agustus 2005. Pada analisa data ini, peneliti menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media cetak tersebut dalam mengkonstruksi peristiwa yang kemudian dijadikan sebuah berita untuk dikonsumsi publik.

Skripsi ini diakhiri pada bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan, penelitian ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh peneliti, kemudian pada sub bab saran, peneliti akan berusaha memberikan alternatif